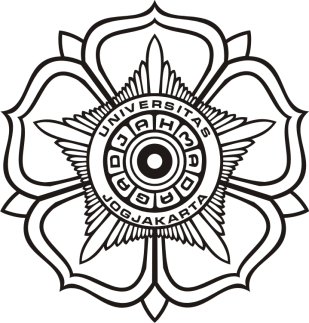
**MAKALAH KEWARGANEGARAAN**

Pengaruh Rancunya Sistem Zonasi PPDB

Pada Rusaknya Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara

dan Relevansinya Pada Kesejahteraan Warga Negara

****

**MUHAMMAD DZAKWAN ZAKY**

**17/410844/SV/12771**

**PROGRAM STUDI KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI**

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, pemerintah mulai menggalakkan sistem zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru atau yang akrab disebut PPDB. Sistem zonasi sendiri, dirancang pemerintah guna tercapainya pendidikan yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, beliau menginginkan tidak ada lagi ‘kastanisasi’ di sekolah, dan adanya sebutan sekolah favorit dan sekolah non-favorit.

Sistem zonasi sendiri mewajibkan kepada sekolah negeri untuk wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari dekat sekolah. Lalu,10 persen sisanya merupakan untuk pendaftar yang berasal dari luar zonasi.

Alih-alih membawa solusi kepada pendidikan di Indonesia, sistem zonasi disambut dengan protes dari elemen masyarakat yang mengklaim bahwa sistem zonasi tidak memberi rasa keadilan dan membatasi potensi dan kemampuan siswa.

Rancunya sistem zonasi pelu dianalisi dikarenakan menciptakan kesenjangan pendidikan anatar warga negara. Infrastruktur dan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah di Indonesia saat ini tidak bisa dipungkiri belum merata. Sebagai warga negara yang ingin mendapatkan pendidikan yang baik, maka warga berhak untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan, tanpa dibatasi suatu aturan. Sistem zonasi telah membatasi kebebasan dan hak warga negara dalam mendapatkan kualitas pedidikan yang baik. Dan hal itu akan merusak harmoni hak dan kewajiban warga negara yang ada di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapatkan pada makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa sistem zonasi perlu diteliti?
2. Mengapa pengaruh sistem zonasi perlu dianalisis dari sudut pandang harmoni hak dan kewajiban warga negara?
3. Apa relevansinya bagi kesejahteraan warga negara?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. Analisa Rancunya Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi sebenarnya sudah mulai dilaksanakan dan sekaligus diuji sejak tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 sistem zonasi mulai digalakkan ke seluruh nusantara. Pada dasarnya sistem zonasi memiliki tujuan mulia yaitu pemerataan pendidikan. Arti pemerataan di sini adalah, semua sekolah akan bertransformasi secara ajaib menjadi memiliki kualitas pendidikan yang sama setelah hanya menerima siswa dari lokasi terdekat.

Sudah merupakan rahasia umum, jika tidak semua sekolah di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sama. Parameter kualitas pendidikan bisa dilihat dari infrastruktur, tenaga kependidikan, dan faktor lain seperti prestasi siswa atau sekolah dan kegiatan ekstra.

Pada sistem zonasi, siswa yang memiliki nilai yang tinggi akan kalah dengan siswa yang lokasinya lebih dekat dengan sekolah. Siswa yang memili kompetensi tinggi tidak akan bisa bersekolah ke sekolah yang memiliki mutu pendidikan tinggi jika hanya karena rumahnya jauh dari sekolah.

Hal inilah yang menjadi masalah besar. Dikutip dari Kompas.com Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan (2014), Darmaningtyas, menilai sistem zonasi yang diniatkan untuk meratakan kualitas pendidikan justru akan menemui hasil yang sedikit berbeda dari yang diinginkan. "Zonasi itu akan menciptakan pemerataan pendidikan, tapi pendidikan yang rendah kualitas. Pemerataan mutu pendidikan yang rendah saya percaya, tetapi kalau pemerataan mutu pendidikan yang baik, enggak," ujarnya.

Alasan selanjutnya, mengapa terjadinya kerancuan dalam sistem zonasi adalah tidak diimbanginya dengan pemerataan perlakuan yang sama pada semua sekolah. Penghapusan kastanisasi pada sekolah, tidak bisa hanya dilakukan dengan pemerataan siswanya, namun juga mutu pendidikan sekolah. Seperti yang dijelaskan diawal, pemerintah seharusnya juga memperhatikan pemerataan fasilitas, infrastruktur, tenaga kependidikan, guru, dan faktor-faktor lain sehingga dapat memberi jaminan kepada masyarakat di manapun siswa bersekolah.

1. Pendapat Para Pakar Tentang Sistem Zonasi PPDB

Menurut pakar pendidikan, Prof Mohamad Amin dikutip dari detik.com “Zonasi itu niatnya baik sekali, sangat mulia karena ada unsur pemerataan dan keterjangakauan akses pendidikan. Namun tetap harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur beserta sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga peserta didik baru akan bisa terakomodir melalui sistem tersebut.

Dikutip dari Tribun Solo, Pakar Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Joko Nurmanto membeberkan penerapan zonasi sekolah harusnya diimbangi dengan kualitas pendidikan, sehingga masyarakat tidak kecewa dengan sistem itu. “Kalau saya hanya satu solusinya, masing-masing sekolah harusnya mendapatkan perlakuan yang sama, guru yang sama dan fasilitas yang sama tidak masalah”.

Menurut Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sistem zonasi menimbulkan kebingungan karena minimnya sosialisasike calon dan orang tua siswa. Sosialisasinya, seharusnya dilakukan secrata terstruktur, sistematis dan masif.

**BAB III**

**MAKNA HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

1. Konsep dan Esensi Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini ini diperintah raja-raja, kita telah mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis, dalam hubungan rakyat dan penguasa. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitaraniasme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.

Hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinyaditerima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.

1. Urgensi Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara

Urgensi harmoni hak dan kewajiban, dapat diuraikan pada beberapa bagian yaitu, agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

1. Agama

Di Indonesia setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Indoensia menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agama masing-masing yang berdasarkan Pancasila.

1. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UUSPN lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1. Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak.

1. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri.

**BAB IV**

**ANALISA DAN RELEVANSI**

1. Pengaruh Rancunya Sistem Zonasi PPDB Pada Rusaknya Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pengaruh kerancuan yang ditimbulkan dalam kondisi pendidikan di Indonesia tentunya memberikan dampak-dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Hal utama yang menjadi permasalahan yang perlu digaris bawahi adalah, sistem zonasi telah melanggar hak warga negara Indonesia. Sesuai isi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 5 ayat 1 yakni “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Sehingga hak dasar anak untuk mendapat pendidikan diindikasi mengalami pelanggaran dengan pemberlakuan sistem zonasi ini. Sistem ini lantas membuat beberapa anak terancam tidak dapat menikmati bangku sekolah.

Keterbatasan kuota yang tersedia di masing-masing sekolah hingga tidak semua zona memiliki sekolah negeri membuat banyak anak, terutama yang jarak rumahnya jauh dari bangunan sekolah, terancam tak bisa melanjutkan pendidikan. Jikapun bisa harus masuk swasta dengan biaya selangit.

Hal ini tentunya sudah merusak harmoni hak dan kewajiban warga negaranya. Karena membatasi pendidikan anak, yang merupakan warga negara Indonesia. Selain melanggar UU No. 20 Tahun 2003, sistem zonasi juga tidak adil bagi warga Indonesia karena tidak semua zona memiliki sekolah negeri. Hal ini membuat siswa yang rumahnya jauh dari sekolah negeri menjadi memiliki kesempatan yang kecil hingga tidak sama sekali untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

Dengan beberapa pengaruh tersebut, sistem zonasi memberikan dampak terbesar yang selama ini pemerintah coba pecahkan, yaitu ketidak meratanya pendidikan. Sistem zonasi, yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut malah menjadi bumerang bagi pemerintah dan memberi efek langsung kepada warga negara.

Ketidak meratanya pendidikan, yang disebabkan oleh kerancuan sistem zonasi, akan memberikan efek berkepanjangan. Yaitu pada kesejahteraan warga negara Indonesia.

Pendidikan merupakan faktor penting, untuk mendidik dan melatih sumber daya manusia Indonesia agar dapat berkembang dan siap untuk menyokoong pertumbuhan negara. Ketidak merataan pendidikan akan menyebabkan hilangnya keseimbangan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan akan berakibat butuk bagi warga Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, karena terjebak dengan sistem zonasi.

Sistem zonasi tidak hanya sekedar mendapatkan sekolah favorit atau tidak, tetapi bagaimana keadilan atas kesamaan pendidikan atas warga negara Indonesia. Hal ini merupakan hal yang wajib diusahakan oleh pemerintah karena selain untuk menjaga harmoni hak dan kewajiban warga negaranya, juga untuk demi berlangsunya pembangunan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan

Sistem zonasi yang belum siap dan memiliki banyak kekurangan akan memberikan dampak negatif yang besar, sekarang atau di masa yang akan datang. Hal ini dapat membawa kemunduran yang pesat bagi pendidikan Indonesia, yang juga belum memasuki kategori maju. Pemerintah harus cerdas dalam mempersiapkan program pendidikan yang sesuai dengan kondisi Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, geografis dan faktor-faktor lainya. Agar program yang akan dijalankan oleh warga negara Indonesia dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga negara.

1. Saran

Saran yang disusun dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Sebelum menerapkan sistem zonasi, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia agar program yang tergolong baru ini, dapat dipahami masyarakat Indonesia dengan baik, dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan.
2. Pemerintah seharusnya menyamaratakan terlebih dahulu kualitas pendidikan yang ada di seluruh sekolah yang ada di wilayah Indonesia, agar sistem zonasi bisa berjalan tanpa merusak harmoni hak dan kewajiban warga negara.
3. Pemerintah seharusnya menimbang ulang sistem zonasi, dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/20/11465771/zonasi-dinilai-malah-membuat-mutu-pendidikan-rendah-akan-merata?page=all>
2. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4591912/pakar-sebut-ppdb-dengan-sistem-zonasi-dinilai-terlalu-dipaksakan>
3. <https://solo.tribunnews.com/2019/06/24/sistem-zonasi-ppdb-2019-masih-timbulkan-polemik-pakar-pendidikan-uns-sebut-harus-diimbangi-kualitas>
4. <https://nasional.tempo.co/read/1216242/9-analisa-kpai-terkait-masalah-ppdb-sistem-zonasi>.
5. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan